BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ekonomi yang menjadi regulasi daerah untuk bisa mengoptimalkan semua sumberdaya alam dan manusia yang dimiliki untuk menjadi motor pemaksimalan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah dan juga merupakan peran alokasi mandiri dalam menetapkan prioritas pertumbuhan. Dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat lebih memratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah melalui potensi masing-masing daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola alokasi dan sumber-sumber sentral yang bisa menjadi lumbung dana untuk pendapatan asli daerah guna melaksanakan pekrtumbuhan infrastruktur daerah yang memadai. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 BAB II Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan, ada 16

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota, namun ada urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah puat yaitu, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Untuk mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah secara optimal maka dilakukan perimbangan keuangan antara peerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Disentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004, terdiri dari tiga macam yaitu, Pajak Daerah (*Tax Assigment*), Dana Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik satu negara yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen

Perkembangan PDRB yang terjadi pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata merupakan suatu portofolio pergerakan ekonomi yang terjadi pada kabupaten/kota. Karena pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah serangkain usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan

distribusi pendapatan masyarakat, miningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergesaran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sketor sekunder dan tersier.

Tabel 1.1

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Pada Kabupaten/Kota daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2015 (Ribu Rupiah)

No	Kabupaten/ kota	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kulonprogo	5.033.070	5.246.150	5.475.150	5.741.600	5.992.790	6.281.566
2	Bantul	12.114.059	12.728.666	13.407.021	14.138.719	14.867.498	15.610.514
3	Gunungkidul	8.848.037	9.248.010	9.695.979	10.177.432	10.639.465	11.151.700
4	Sleman	21.481.644	22.645.851	23.957.112	25.367.414	26.740.537	28.159.674
5	Yogyakarta	17.202.150	18.206.090	19.189.070	20.239.560	21.312.140	22.412.175

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata.

Dari data tabel 1.1 diatas terlihat bahawa setiap kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta megalami peningkatan dari tahun ketahun. Ini menunjukan suatu pertumbuha ekonomi yang positif bagi masing-masing Kabpaten/Kota. Terlihat pad tabe tersebut bahawa Kabupaten Sleman memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang paling tinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini dikarenakan Kabupaten Sleman berinovasi dalam kebijakan pemerintah dengan membuka keran investasi pada daerah yang cukup besar, sehingga pelung para investor untuk menanamkan modal pada Kabupaten Sleman memiliki kesempatan yang cukup besar. Ini uga menandakan bawah adanya perpindahan tumpuan ekonomi penopang daerah yaitu dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan

sampai pada sektor tersier.

Ini terlihat dari penerimaan daerah yang dimiliki Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sebesar 21.481.644 dan pada tahun 2015 sebesar 28.159.674 yang menunjukan bahwa adanya pertumbuhan pendapatan dari kurun waktu enam tahun sebesar 6.678.030. Sedangkan daerah yang memiliki Pendapatan Domestik Regional Bruto paling kecil adalah Kabupaten Kulonprogo. Ini dikarena Distribusi kebijakan pemerintah berupa kegiatan ekonomi yang masih berpusat pada Kabupaten yang jarakanya tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan penerimaan terbesar pada tahun 2015 sebesar 6.281.566 Kulonprogo merupakan daerah yang memiliki pendaptan terkecil, tetapi tidak menutup kemungkin jika pemaksimalan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Kulonprogo seperti pariwisata yang ada dapat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun-tahu berikutnya.

Tabel 1.2

Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Persentase)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kulonprogo	6.8	6.48	5.9	5.55	6.74	8.67
2	Bantul	10.55	8.25	8.04	10.61	10.18	12.27
3	Gunungkidul	3.41	3.55	2.85	3.69	3.9	2.57
4	Sleman	16.33	17.26	16.35	16.6	16.19	12.03
5	Yogyakarta	17.22	20.02	19.59	18.81	16.14	14.42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tabel di atas yang menggambarakan persebaran persentase tingkat pendidikan pada tingkat D3/S1 terjadi pluktuasi pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat pada beberapa kabupaten/kota yang ada seperti Kulonprogo pada tahun 2010-2012 persentasi kelulusan atau masyarakat yang telah menyelesaikan studi pada jenjang D3/S1 mengalami peningkatan yang postif dari tahun ketahun, sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan pada tingkat 5.55% dan mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2015 sebesar 8.67%.

Sedangkan pada Kabupaten Bantul terjadi fluktuasi dari tahunke tahunnya tetapi tingat pendidikan yang ada pada Kabupaten Bantul masih cukup tinggi masih pada persentasi terndah tingkat pendidkan pada posisi 8.04% dan tertinggi pada tingkat 12.27% pada tahun 2015.

Jika Kabupaten Bantul memiliki kesadaran pendidikan yang masih pada tataran yang cukup tinggi berbeda kondisinya dengan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki persentasi tingkat pendidikan D3/S1 yang masih sanagat rendah. Ini dikarenakan kesadaraan akan akses pendidikan yang masih cukup rendah. Sehingga banyak masyarakat pada jenjang usia sekolah memiliki orientasi pemikiran untuk bekerja. Ini bisa dipengaruhi oleh kondisi geografis dan juga demografis yang ada.

Berbanding terbalik dengan Kabupaten Sleman yang memiliki presentase tingkat pendidikan yang terjadi penuruna yang cukup tinggi yaitu pada tingkat 12.03% pada tahun 2015 berbeda jauh pada tahun-tahun sebelumnya pada posisi

persentasi tingkat pendidkan rata-rata 16% setiap tahunnya.

Sedangkan pada Kota Yogyakarta memiliki persentasi tingakat pendidikan terbesar diantara seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 14.42% pada tahun 2015.

Jika tingkat kesadaran pendidikan yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan kualitas SDM yang ada semakin membaik dari tahun-ketahunnya. Jika kualitas SDM yang semakin membaik maka tingkat tenaga kerja terserap harus dibenahi secara perlahan untuk menampung dan memberdayakan SDM dengan kualitas yang terbaik. Hal ini sangat penting dilakukan agar pendapatan perkapita yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap kabupaten/kota yang ada.

Ketika ketersedian SDM yang berkualitas yang dimiliki pada kabupaten/kota maka secara tidak langsung penyerapan tenaga kerja seharusnya bisa lebih besar. Oleh karena itu perluasan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas utama oleh pemerintah daerah untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah penduduk yang semikn tinggi dan juga sebagai wadah peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Tabel 1.3

Persentase Tenaga Kerja Terserap pada Kabupaten/Kota Pada tahun 2010-2011

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kulonprogo	73.48	66.81	71.37	73.46	75.11	71.81
2	Bantul	70.15	96.2	96.4	96.64	97.43	97

3	**Gunungkidul**	**73**	**75.93**	**80.43**	**77.87**	**77.65**	**70.77**
4	**Sleman**	**67.15**	**68.75**	**66.34**	**65.22**	**68.05**	**65.45**
5	**Yogyakarta**	**66.38**	**68.26**	**66.97**	**64.38**	**70.07**	**66.7**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari tabel 1.5 diatas yang menggambarkan persentase tenaga kerja terserap pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat ada fluktuasi penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota. Hal ini sangat sering terjadi karena ingkat upah dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya.

Penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada setiap daerah kabupaten/kota yang ada terdapat sektor-sektor yang sangat strategis dalam penyerapan tenaga kerja yang begitu besar. Sektor sektor yangdominan pada setiap kabupaten/kota yang ada seperti sektor pertania, jasa, industri dan manufaktur, perhotelan dan lain sebagainya.

Seperti pada Kabupaten Kulonprogo yang dimana terjadi penyerapan yang cukup tinggi pada tahun 2014 yaitu sekitar 75,11%, ini merupakan angka yang cukup prestisius mengingat Kabupaten Kulonprogo murapakan daerah yang dimana pendapatan daerah masih didominasi pada sektor primer sebagai penerimaan daerah terbesarnya. Begitu juga pada Kabupaten Bantul yang dimanapenyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2014 yaitu sekitar 97,43% tenaga kerja yang terserapini merupakan persentasi yang menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat pada usia produktif sudah bekerja. Sedangkan pada Kabupaten Gunungkidul penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi pada tahun

2012 yaitu sekitar 80.43%, yang dimana penerimaan daerah yang cukup tinggi masih pada sektor primer atau pada sektor pertanian, dan juga sektor pariwisata yang terus dikembangkan pada Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan pada Kabupaten Sleman dimana penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu pada tahun 2011 sebesar 68,75%, angaka ini cukup kecil jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten/kota lainya. Hal ini bisa dikarena oleh jumlah masyarakat di Kabupaten Sleman yang cukup tinggi di antara daerah lainnya sehingga akomodasi penduduk pada usia yang produktif belum bisa terakomodasi secara maksimal melalui lepangan pekerjaan. Pada Kota Yogyakarta sendiri terjadi penyerapan tenaga kerja yang besar pada tahun 2014 sebesar 70,07% .

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan juga mengingat begitu banyaknya faktro-faktor yang memiliki keterkaitan dalam prekonomia maka peneliti hanya membahas pada:

1. Variabel-variabel yang dianggap memiliki hubungan terhadap Pendapatan Perkapita yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, dan juga Tenaga Kerja Terserap.
2. Data yang digunakan adalah data kuartalan yaitu tahun 2011:Q1-2015:Q2
    a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
    b. Tingkat Pendidikan
    c. Tenaga Kerja Terserap

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Sejauh mana Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh pada Pendpatan Perkapita?
2. Berapa besar jenjang pendidikan (D3/S1) berpengaruh pada Pendaptan Per Kapita?
3. Sejauh mana Tenaga Kerja Terserap berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita

D. Tujan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini peneliti ingin menggambarkan seberapa jauh **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Perkapita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2010-2015**, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui efek Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Pendapatan Per Kapita
2. Untuk mengetahui Tingkat pendidikan (D3/S1) berpengaruh pada Pendaptan Per Kapita
3. Untuk mengetahui Penyerapan tenga kerja berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita.

E. Manfaat Peneltian

1. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi.
2. Sebagai sarana untuk fortopolio kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah melalui segmentasi peraturan daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Per Kapita.
3. Sebagai bacaan, informasi, refrensi dan penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait tentang Pendaptan Per Kapita.